



## MERDEKA BELAJAR DALAM PENDIDIKAN INDONESIA

Ansori, Fita putridiyanti  
Universitas Nurul Jadid (UNUJA)  
Ansorimu123@gmail.com

### Abstract :

*Tujuan dari pendidikan adalah menjadikan peserta didik tidak hanya cerdas dalam intelektual tetapi juga memiliki karakter karakter yang baik dan Sistem pendidikan juga harus mengikuti perkembangan jaman. Sistem pendidikan harus dapat menghasilkan peserta didik milenial yang mampu bersaing dalam menghadapi era industri 4.0. Di era industri 4.0 semua berbasis digital, oleh karena itu sistem pendidikan di Indonesia selalu mengalami perbaikan dan perubahan. Perubahan dalam pendidikan diawali dengan pidato Mendikbud Nadiem Makarim yang mengusulkan tentang gerakan “ Merdeka Belajar “. Dalam merdeka belajar ada empat kebijakan yang diusulkan oleh Mendikbud yaitu pertama USBN diganti ujian (asesmen), kedua 2021 UN diganti dengan Aessment Kompetensi Minimum ( AKM ), dan Survey Karakter (SK ), ketiga RPP dipersingkat, keempat Zonasi PPDB lebih fleksibel. Usulan Mendikbud ini adalah untuk mengubah pola lama dalam pendidikan yang hanya mementingkan penguasaan materi saja. Sehingga peserta didik tidak dapat berfikir kritis dan inovatif. Merdeka belajar usulan Nadiem, memiliki maksud bahwa guru merdeka memiliki makna unit pendidikan atau sekolah guru dan muridnya mempunyai kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri, dan kreatif.*

**Key words:** Merdeka Belajar, Era Industri4.0

### PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang sangat pesat, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) menyiapkan para pelajar atau peserta didik untuk menyongsong perubahan, kemajuan dan perkembangan zaman, untuk dituntut mampu melaksanakan, dan merancang proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif (Nabila Syarifa:2019). supaya dapat meraih capaian dan tujuan pembelajaran yang mencakup aspek sikap pengetahuan dan keterampilan secara optimal dan tentunya juga relevan.

Di era revolusi industri 4.0 terdapat tantangan tersendiri sekaligus menjadi peluang bagi lembaga pendidikan untuk menjadi titik prasyarat untuk bisa lebih maju dan berkembang. Lembaga pendidikan harus mempunyai daya inovasi dan juga dapat memberlakukan sebuah kolaborasi, jika sebuah lembaga pendidikan tidak mampu untuk berkolaborasi dan berinovasi maka akan tertinggal jauh di telan waktu, dan pula sebaliknya jika lembaga mampu menciptakan sumber daya yang mampu



mengembangkan, memajukan dan mewujudkan cita-cita bangsa yaitu membelajarkan manusia (Nizam:2020)

Oleh karena itu Lembaga pendidikan harus mampu menyelaraskan dan menyeimbangkan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman dan sistem pendidikan diharapkan mampu mewujudkan peserta didik memiliki daya keterampilan yang mampu berpikir secara kritis memecahkan masalah serta memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dan berkolaborasi yang kreatif dan inovatif.

Tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengembangan kurikulum, apalagi di era Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru, yakni literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berporos kepada berakhlak mulia. Salah satu upaya untuk menjawab tantangan tersebut adalah lahirnya kebijakan hak belajar bagi mahasiswa di luar program studi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi).

Karena pada era revolusi 4.0 terjadi perubahan struktur sosial yang berubah secara cepat, ikatan sosial bergantung pada teknologi, hilangnya beberapa jenis pekerjaan, masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan memiliki daya saing yang tangguh. Adanya perbedaan karakteristik sistem pendidikan di setiap era. Pada era revolusi 1.0, pengetahuan atau pendidikan tidak dianggap penting dan lebih mengandalkan tenaga. Pada era revolusi 2.0, membuat rancangan belajar, mengadakan ujian pada tiap tahap, guru khusus, penilaian satu skala, tidak terlihat jalur belajar siswa dalam sistem. Pada era revolusi 3.0, sistem pendidikan pada era revolusi industry 3.0 cenderung sama dengan revolusi 2.0. Perbedaan terletak pada sistem pendidikan di era 3.0 mulai memasuki digitalisasi. Pada era revolusi 4.0, pendidikan melalui sekolah harus memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, tes formatif, guru sebagai mentor, siswa dipandang tidak sama dan menjadi tidak sama sesuai potensi atau talenta masing masing (Iwan.S:2020).

Kebijakan yang populer dengan nama Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang akan diambil (Nabila Syarif:2019). Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal (Iwinsah. R:2020).

Oleh karena itu sistem pendidikan di Indonesia selalu mengalami perbaikan dan perubahan. Perubahan dalam pendidikanawali dengan pidato Mendikbud Nadiem Makarim yang mengusulkan tentan gerakan “ Merdeka Belajar “. Dalam merdeka belajar ada empat kebijakan yang diusulkan oleh Mendikbud yaitu pertama USBN diganti ujian



(asesmen), kedua 2021 UN diganti dengan Asesment Kompetensi Minimum ( AKM ), dan Survey Karakter (SK ), ketiga RPP dipersingkat, keempat Zonasi PPDB lebih fleksibel. (Rosyidi. U: 2020)

Usulan Mendikbud ini adalah untuk mengubah pola lama dalam pendidikan yang hanya mementingkan penguasaan materi saja. Sehingga peserta didik tidak dapat berfikir kritis dan inovatif. Merdeka belajar usulan Nadiem, memiliki maksud bahwa guru merdeka memiliki makna unit pendidikan atau sekolah guru dan muridnya mempunyai kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri, dan kreatif.

Dasar hukum yang menyertai upaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia dilandasi tanggung jawab untuk menjalankan amanat: (1) Pembukaan UUD 1945 alinea IV dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (2) Pasal 31 ayat 3 yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (3) UU Sisdiknas Tahun 2003 menimbang bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan local, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan; (4) UU Sisdiknas Tahun 2003 pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab (KEMENDIKBUD:2020)

#### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam jenis penelitian ini. Pemeriksaan ini dilakukan di Jl. SMP Darul Lughah Wal Karomah. Jendral Panjaitan 12 Sidomukti, Jawa Timur, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Partisipan dalam penelitian ini adalah 47 guru SMP Darul Lughah Wal Karomah. Data kuantitatif digunakan dalam penyelidikan ini. Dalam ulasan ini, informasi penting diperoleh dari survei yang diberikan kepada guru dan staf. Informasi penting mencakup karakter responden, khususnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan sudut pandang responden tentang variabel kepemimpinan kepala sekolah, budaya pesantren terhadap motivasi kerja guru. Sedangkan informasi opsional melalui persepsi sebagai data tambahan di samping profil SMP Darul Lughah Wal Karomah. Pengolahan data menggunakan program SPSS 23.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. pengertian Merdeka Belajar

Merdeka belajar adalah salah satu inovasi dari Menteri Pendidikan Indonesia yang memberikan kebebasan pada suatu Lembaga pendidikan dan otonominya, dan merdeka dari birokratisasi, dimana pengajar dapat kebebasan dari birokrasi yang rumit serta peserta didik yang diberikan kebebasan untuk dapat memilih bidang yang mereka sukai (Iwan.S:2020).

Lahirnya program merdeka belajar ini karena adanya banyak keluhan di sistem Pendidikan, yang dimana salah satu keluhannya adalah soal banyaknya peserta didik yang ditarget dengan nilai-nilai tertentu. Diharapkan dengan adanya program merdeka belajar ini peserta didik dan guru dapat bebas dan berinovasi dalam belajar. Merdeka belajar merupakan kemerdekaan dalam berfikir, kemerdekaan berfikir ini wajib ada di guru terlebih dahulu. Peserta didik tidak akan merdeka kecuali gurunya sudah merdeka terlebih dahulu (Rosyidi.U:2020).

Oleh karena itu Merdeka belajar dapat dimaknai pemberian ruang yang lebih terhadap siswa dengan adanya kesempatan belajar secara nyaman tenang dan bebas tanpa adanya tekanan, dengan memperhitungkan bakat alamiah yang dimiliki setiap siswa. Dalam pidatonya pada hari guru nasional Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (MENDIKBUD) Nadiem Makarim memaparkan suatu kebijakan mengenai merdeka belajar yang didalamnya terdiri dari empat poin yang di gadang-gadang akan membawa perubahan dan dampak besar dalam dunia pendidikan.

Secara lugas Nadiem Makarim menjelaskan tentang merdeka belajar dengan empat pokok bahasan, pertama USBN diganti ujian (asesmen), kedua 2021 UN diganti dengan Asesment Kompetensi Minimum (AKM), dan Survey Karakter (SK), ketiga RPP dipersingkat, keempat Zonasi PPDB lebih fleksibel berikut penjabaran dari ke empat pokok pembahasan USBN diganti ujian (asesmen).

Sebelumnya konsep pelaksanaan Ujian Sekolah Berbasis Nasional mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Tetapi berdasarkan Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional, khususnya pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.

Selanjutnya pada Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan berupa portofolio, penugasan, tes tertulis atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Kemudian pada Pasal 6 ayat 2



menyatakan bahwa kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan/ program pendidikan yang bersangkutan. Dengan demikian jika mengacu pada Permendikbud No 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional ini menunjukkan bahwa sekolah dan guru merdeka dalam menilai hasil belajar siswa (Webiho Teguh:2017).

Menurut Nadiem, situasi saat ini USBN membatasi penerapan dari semangat UU Sisdiknas yang memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan. Untuk arah kebijakan barunya, Tahun 2020 USBN akan diganti dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Nantinya, ujian dilakukan untuk menilai kompetensi siswa. Dimana ujian dalam bentuk tes tertulis dan atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif. Seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis dan sebagainya). Dengan begitu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Bahkan diharapkan anggaran USBN dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran (Kompas:2019) 2021 UN diganti.

Menteri Nadiem melihat situasi saat ini materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Disamping itu, UN dianggap jadi beban siswa, guru dan orangtua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Karenanya tahun 2020, UN akan dilaksanakan terakhir kalinya. Sebagai penggantinya, pada 2021, UN diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum ( AKM ) dan Survei Karakter ( SK ). Usulan Merdeka Belajar Mendikbud Makarim Asesmen tersebut tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum seperti yang diterapkan dalam ujian nasional selama ini, melainkan melakukan pemetaan terhadap dua kompetensi minimum siswa, yakni dalam hal literasi dan numerasi. Asesmen ini dilakukan pada siswa di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11). Arah kebijakan baru ini juga mengaju pada praktik baik padan level internasional seperti Programme for International Student Assessment (PISA) dan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) (Kompas:2019)

RPP dipersingkat. Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyederhanaan RPP, meliputi: (1) Penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif dan berorientasi pada siswa; (2) dari 13 komponen RPP yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran disederhanakan menjadi komponen inti yang terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian pembelajaran (assessment) yang wajib dilaksanakan oleh guru dan komponen lainnya hanya sebagai



pelengkap; (3) sekolah, kelompok guru mata pelajaran dalam sekolah, Kelompok Kerja Guru/ Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG/ MGMP) dan individu secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar siswa. Dengan adanya kemerdekaan dalam menyusun RPP diharapkan akan lebih banyak interaksi antara guru dan siswa yang lebih aktif, dinamis dengan model pembelajaran yang tidak kaku (Laras:2020)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) selama ini, guru diarahkan mengikuti format RPP secara kaku. Tetapi nanti guru akan bebas memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP. Dulu, RPP terlalu banyak komponen dan guru diminta menulis sangat rinci (satu dokumen RPP bisa lebih 20 halaman). Tetapi nanti akan dipersingkat yakni RPP berisi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen. RPP hanya 1 halaman saja. Sehingga penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif yang menjadikan guru punya waktu untuk mempersiapkan juga mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri (Kompas:2020)

Zonasi PPDB lebih fleksibel.

Sebelumnya PPDB diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Selanjutnya diatur dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 11, dalam persentase pembagiannya meliputi: (1) untuk jalur zonasi paling sedikit 50 persen; (2) jalur afirmasi paling sedikit 15 persen; (3) jalur perpindahan tugas orang tua/wali lima persen; dan (4) jalur prestasi (sisa kuota dari pelaksanaan jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua /wali (0-30 persen).

Jelas ini berbeda dengan kebijakan PPDB pada tahun-tahun sebelumnya, setidaknya terdapat dua hal penting: (1) kuota penerimaan siswa baru lewat jalur berprestasi, semula 15 persen, sekarang menjadi 30 persen; dan (2) adanya satu penambahan baru jalur PPDB, yaitu melalui jalur afirmasi, yang ditujukan terutama bagi mereka yang memegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Utomo Prastyo dan Santi Puji:2019), Dengan demikian untuk PPDB 2020 masih tetap menggunakan sistem zonasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih bersifat fleksibel, dengan maksud agar dapat mengakomodir ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.

Terpenting dalam proporsi finalisasinya, daerah berwenang untuk menentukan dan menetapkan wilayah zonasinya. Secara umum sistem zonasi dalam PPDB itu sudah baik, karena dapat mendorong hilangnya diskriminasi bagi anggota masyarakat untuk bersekolah di sekolah-sekolah terbaik ( )Untuk program "Merdeka Belajar" yang terakhir ini, Nadiem menjelaskan bahwa Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Adapun kebijakannya, PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Menurut Nadiem, komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Untuk jalur



prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. "Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi," ujar Nadiem (Kompasiana:2020)

Merdeka belajar Bisa dikatakan merupakan otonomi dalam bidang pendidikan. Kebijakan otonomi pendidikan mulai dihidupkan kembali di era ini. Memerdekakan unit pendidikan , memerdekakan guru, memerdekakan peserta didik dapat merangsang munculnya inovasi inovasi baru. Peserta didik dapat belajar secara mandiri dan kreatif ,sehingga seluruh peserta didik Indonesia yang beraneka ragam suku dan kebudayaan dapat memiliki ragam cara belajarnya masing-masing. Diungkapkan oleh Dr Yuli Bangun Nursanti, M.Pd, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri fokus dari Merdeka belajar adalah terletak pada proses pembelajaran. Saat ini dalam proses pembelajaran masih banyak kita jumpai peserta didik yang belum bisa memberikan pemikiran secara analisis . Dalam Merdeka belajar diharapkan dapat dikembangkan cara berfikir kritis dan analitis (Iwinsah.R:2020).

UN akan diganti dengan dengan ujian yang dirancang lebih sederhana tak banyak hafalan dan soal bersifat analitis yang merupakan penerapan pembelajaran HOTS ( Hight Order of Thinking Skill ). Disini yang dipentingkan adalah kemampuan berfikir kritis, logis, reflektif, dan meta kognitif . Pada pembelajaran HOTS peserta didik diberi kesempatan untuk menganalisis suatu persoalan dan juga mengevaluasinya, Dari situ pula peserta didik dapat mencipta. UN akan digantikan dengan konsep Assesment Kompetensi Minimum (AKM ) dan Survey Karakter ( SK ). Untuk konsep Assesment Kompetensi Minimum ( AKM ) materinya meliputi Literasi dan Numerasi . Literasi berkaitan dengan penggunaan bahasa dan Numerasi berkaitan dengan matematika. ). Arah kebijakan baru ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS. Merosotnya peringkat Indonesia pada Programme for International Student Assessment (PISA) 2018, yang berada di urutan ke-72 dari 77 negara akan kemampuan membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan atau sains yang dirilis OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) harusnya jadi momentum untuk membenahi arah kebijakan politik pendidikan dan praktik pendidikan yang berlangsung selama ini.

Survey Karakter ( SK ) juga tidak bersifat hafalan. Pokok pokok materi dalam survey diharapkan dapat membantu guru dalam memahami latar belakang peserta didiknya , sehingga guru dapat memahami peserta didiknya, Dari hasil survey diharapkan guru dapat menyimpulkan apakah peserta didiknya merupakan pribadi yang merdeka berpendapat serta bertanggung jawab atautkah pribadi yang selalu tertekan, tidak mampu berpendapat dan selalu lepas dari tanggung jawab. Dan dari hasil survey diharapkan guru dapat menerapkan pembelajaran yang tepat untuk peserta didik yang memang benar benar bermasalah sampai akhirnya peserta didik menjadi pribadi yang benar benar merdeka. Dengan merdeka dalam belajar diharapkan menjadikan peserta



didik berfikir kritis, dapat mengukan bahasanya secara tepat, dan mampu mencipta secara tanggung jawab, berjiwa gotong royong tidak ada tekanan dari siapapun (Rosyidi.U:2020)

## **2. Merdeka Belajar Di Era Revolusi Industri 4.0**

Era Revolusi Industri tidak lepas dari era Digital. Era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan tehnologi digital. Tehnologi digital adalah tehnologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang berhubungan dengan internet, merdeka belajar mengandung arti peserta didik merdeka untuk belajar dengan caranya masing-masing, peserta didik juga merdeka mencari bahan rujukan untuk menemukan suatu informasi yang dikehendaki. Harus diingat bahwa peserta didik masa kini merupakan kaum milenial yang disebut generasi digital native yaitu mereka yang sudah mengenal media elektronik dan digital sejak lahir, IT khususnya internet bukan merupakan barang asing bagi mereka (Utomo Prasetyo dan Santi Puji:2019)

Jadi untuk belajar peserta didik yang merdeka tidak hanya mencari sumber informasi dari buku buku dengan duduk di perpustakaan saja, mereka lebih senang berselancar mencari informasi dari gawai yang mereka miliki, bahkan saat ini buku buku elktronik menjadi lebih menarik. Dunia pendidikan yang ada saat ini harus dapat merespon dengan baik agar dapat bertahan dan bersaing . Keberadaan tehnologi digital menstimulus kreatifitas, Kreatifitas peserta didik dapat tumbuh dengan cepat dengan stimulasi informasi yang diterima melalui media digital. Anak dapat menuangkan ide dan kegiatan nya dengan menggunakan aplikasi dan berbagai sumber belajar digital yang beragam yang tersedia (Wibowo Teguh:2017).

Dalam merdeka belajar tidak hanya literasi dan numerasi saja yang diperkuat tetapi juga penguatan pada aspek karakter. Oleh karena itu untuk optimalisasi penggunaan gawai android sebagai sumber belajar peserta didik juga harus dibekali dengan pendidikan karakter (Pur:2020). Memang harus kita akui kesempatan akses seluas-luasnya dapat diperoleh dari sebuah gawai Android, hal ini akan dapat menimbulkan masalah jika tidak dilakukan secara bijaksana. Pendidikan karakter adalah kuncinya. Melalui penguatan karakter diharapkan peserta didik memiliki tanggung jawab dan displin terhadap materi yang mereka rujuk dari gawai. Dengan kata lain mereka dapat menahan diri untuk tidak berusaha mengetahui sesuatu materi atau informasi sebelum waktunya (Masrum Bakroni:2017)

Mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih melahirkan media media baru atau biasa dikenal dengan new media, New media juga dapat menjadi sumber dan media pembelajaran saat ini. Instagram, Twitter, Website, blog, youtube merupakan bentuk bentuk bentuk dari media baru, terdapat kelebihan dari media baru tersebut yaitu memberikan kemudahan berkomunikasi serta mempermudah dan mempercepat untuk mendapatkan informasi.



Perkembangan teknologi menyebabkan hilangnya beberapa profesi pada lapangan pekerjaan, dan digantikan dengan tehnik digital, contohnya yaitu untuk akses buka dan tutup pintu tol yang sudah diganti dengan tehnik digital. Tapi tidak dipungkiri dengan kemajuan teknologi juga akan timbul profesi-profesi baru seperti halnya jurnalis-jurnalis baru yang bukan dari kalangan wartawan yang sering disebut Journalist Citizen ( JC ), Journalist Citizen biasanya lebih kreatif sehingga dapat menyampaikan informasi yang lebih menarik. Jadi sebetulnya dengan adanya perkembangan teknologi dapat menyebabkan masyarakat menjadi lebih kreatif dan inovatif, Dengan adanya era revolusi industri maka guru sebagai pendidik dan motivator dapat mempersiapkan

peserta didiknya untuk dapat bersaing dimasa depan (Purwoko Agung:2019)

Sumber belajar yang tidak asing digunakan oleh peserta didik adalah Google. Google adalah tehnologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran informasi. Dalam pembelajaran google memiliki banyak peran (Sapt:2019). Google telah mengalihkan buku, guru, dan sistem pengajaran yang sebelumnya konvensional. Google juga mampu mengubah jejaring pemikiran pelaku pendidikan. Peserta didik dapat searching seluas-luasnya untuk bereksplorasi sebuah pengetahuan baru. Dari mencari arti kata, materi pembelajaran, sampai tehnologi terkini akan mudah didapat (Utomo Prasetyo dan Santi Puji:2019)

Penggunaan Google dalam pembelajaran dapat merupakan sesuatu yang lebih, tetapi harus diingat penggunaan Google juga mempunyai dampak negatif yaitu antara lain melatih peserta didik berfikir pendek dan instan, serta tidak dapat berkonsentrasi dalam jangka panjang, Didalam kelas siswa sebagai pengguna Google tetap membutuhkan guru. Ini sesuai dengan Permendikbud 15 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa guru merupakan tenaga profesional dengan tugas pokok mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Sebaliknya guru juga perlu Google untuk media dan alat pengajaran yang canggih, Google dapat dijadikan teman untuk memotivasi guru untuk terus meningkatkan dan terus memperbaharui pengetahuannya.

Oleh karena itu Di era abad 21 yang serba teknologi modern ini guru dituntut untuk melek teknologi agar dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Guru harus menjadi inspirator bagi siswanya untuk dapat berfikir kritis dan analitis serta dapat memecahkan masalah, Seorang guru yang kompeten dan profesional selai memiliki pengetahuan yang luas juga mampu menguasai teknologi untuk mendesain pembelajaran yang menarik dan mampu menggugah kreatifitas peserta didiknya (Sapt:2019).

Pembelajaran yang sarat dengan ide ide kreatif mampu menggiring peserta didik berfikir kritis, mampu mengatasi masalahnya, berani mengemukakan pendapatnya ini adalah ciri ciri peserta didik yang merdeka belajar seperti yang disampaikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim. Dengan kata lain dengan menggunakan media digital



sebagai sumber belajar seorang guru profesional dapat mencetak Sumber Daya Manusia yang unggul yang akan menjadi bonus demografi bagi bangsa Indonesia.

### **3. PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR DI INDONESIA.**

Pelaksanaan program merdeka belajar memerlukan proses dan waktu, perlu kesiapan, perlu kesepakatan, dan solidaritas. Karena kebijakan ini merupakan sesuatu yang baru maka siswa dan guru sama sama harus menyiapkan diri dan saling memberi motivasi. Dengan adanya perubahan paradigma ini , untuk memajukan pendidikan para guru harus menguasai IT. Diharapkan guru generasi dulu bisa beradaptasi dan bisa bersanding dengan guru generasi sekarang.

Untuk pendidikan yang lebih baik, kini saatnya masyarakat ikut mengawal penerapan kebijakan "Merdeka Belajar" berjalan dengan optimal. Memang tidak mudah, akibat sistem pendidikan Indonesia yang sudah "membatu", utamanya budaya guru dalam mengajar. UN (Ujian Nasional) bukan dihapus. Tapi diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang bertumpu pada kemampuan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter peserta didik (Nabilah Syarifa:2019).

Program merdeka belajar yang merupakan reformasi pendidikan akan memperoleh hasil yang menggembirakan jika dieksekusi dengan sungguh sungguh, pemerintah harus menghapus kebijakan kebijakan yang tidak sesuai dan membebani guru, Menyusun kebijakan baru yang diregulasi dan dimplementasi dalam pendidikan. Jika hal tersebut ditindak lanjuti maka tidak mustahil program merdeka belajar tercapai yang akan membuat guru dan peserta didik benar-benar merdeka belajar sehingga dihasilkan generasi muda yang unggul, Dengan kata lain bonus demografi dapat dimanfaatkan dan diraih oleh bangsa Indonesia.

Salah satu dari program merdeka belajar usulan Nadiem Makarim yang sudah diterapkan dan berjalan adalah sistem Zonasi PPDB lebih fleksibel. Memang harus diakui dengan adanya sistem zonasi yang berlaku membuat calon peserta didik yang berprestasi tidak dapat memperoleh kesempatan memilih sekolah yang diminati karena memiliki jarak yang jauh antara sekolah dengan tempat tinggalnya. Tetapi dengan adanya fleksibilitas dalam sistem zonasi pemerintah setempat dapat membuat aturan aturan baru terkait dengan sistem zonasi. Aturan aturan baru adalah berupa berbagai macam jalur yang dapat ditempuh oleh calon peserta didik untuk mendaftarkan diri pada sekolah yang diminatinya. Jalur jalur tersebut antara lain Jalur zonasi murni, jalur prestasi, jalur Afirmasi dan jalur Mutasi (Masrum Bakroni:2017)

### **KESIIMPULAN**

Merdeka belajar adalah salah satu inovasi dari Menteri Pendidikan Indonesia yang memberikan kebebasan pada suatu Lembaga pendidikan dan otonominya, dan merdeka dari birokratisasi, dimana pengajar dapat kebebasan dari birokrasi yang rumit serta peserta didik yang diberikan kebebasan untuk dapat memilih bidang yang mereka sukai



Era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang berhubungan dengan internet, merdeka belajar mengandung arti peserta didik merdeka untuk belajar dengan caranya masing-masing, peserta didik juga merdeka mencari bahan rujukan untuk menemukan suatu informasi yang dikehendaki. Pelaksanaan program merdeka belajar memerlukan proses dan waktu, perlu kesiapan, perlu kesepakatan, dan solidaritas. Karena kebijakan ini merupakan sesuatu yang baru maka siswa dan guru sama sama harus menyiapkan diri dan saling memberi motivasi



## DAFTAR PUSTAKA

- Iwan, S. (2020) WEBINER APSPBI: IMPLIKASI SEMANGAT MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA. Indonesia: HUMAS USD. Available at: <https://youtu.be/kKfrOCf7Zj0>
- Iwinsah, R. (2020) Menakar Konsep "MERDEKA BELAJAR", Intens.News. Available at: <https://intens.news/menakar-konsep-merdeka-belajar/>
- KEMENDIKBUD (2020) Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Edisi ke-3. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI.
- KOMPAS com.(2019) "Gebrakan"Merdeka Belajar" Berikut 4 Penjelasan Mendikbud Nadiem", <https://edukasi.kompas.com/read/2019/12/12/12591771/gebrakan-merdeka-belajar-berikut4-penjelasan-mendikbud-nadiem?page=all>.
- KOMPASIANA,Com (16 Desember 2019 07:24), Kebijakan "Merdeka Belajar" Kembalikan Literasi Pendidikan ke Khitah, <https://www.kompasiana.com>
- Laras (2020), Penyederhanaan RPP berdampak Positif , DERAP GURU Jawa Tengah Edisi 241 Th XXFebruari 2020, Lontar Merdeka - Semarang.
- Masrum Bakroni (2017), Pro Kontra Sism Zonasi Dalam PPDB, DERAP GURU Jawa Tengah No 210 Th XVII- Juli 2017, Lontar Merdeka - Semarang.
- Nabilah Syarif ( 2019 ) Teknogi Mencetak Masyarakat Kreatif JIWA RAGA Edisi II Tahun 2019
- Nizam ; Implementasi Kampus Merdeka Belum Sepenuhnya Dipahami, Suara Merdeka , Sabtu 7 Maret 2020 )
- Pur (2020), Merdeka Belajar Dan Penghapusan UN,DERAP GURU Jawa TengahEdisi 241 Th XX - Februari 2020, Lontar Merdeka - Semarang
- Purwoko Agung (2019), Mengubah paradigma penggunaan handphone Bukan Untuk Bermain Tetapi Untuk Belajar, DERAP GURU Jawa Tengah Edisi 238 Th XIX November 2019, Lontar Merdeka - Semarang
- Rosyidi, U. (2020) Merdeka Belajar; Aplikasinya dalam Manajemen Pendidikan &Pembelajaran di Sekolah. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI.
- Sapt (2019), Google Tidak Selalu Positif, Ini Dampak Negatifnya, DERAP GURU Jawa Tengah Edisi 233 Th XIX - Juni 2019. Lontar Merdeka - Semarang
- Sapt (2019), Karena Berguru Bukan Bergoogle, DERAP GURU Jawa Tengah Edisi 233 Th XIX - Juni 2019, Lontar Merdeka -Semarang.
- Tim Kompasiana (2020) Merdeka Belajar demi Mewujudkan Indonesia Maju, [kompasiana](https://kompasiana.com). Available
- Utomo Prasetyo dan Santi Puji (2019), Guru Mencetak Siswa Cerdas Dengan Media Digital, DERAP GURU Jawa Tengah Edisi 232 Th XIX - Mei 2019, Lontar Merdeka - Semarang.



*Wibowo Teguh (2017), ZONASI Aturan Bagus Yang perlu di tinjau lagi, DERAP GURU Jawa Tengah No 210 Th XVII -Juli 2017, Lontar Merdeka - Semarang*